

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
YANG DIMODERASI KOMISARIS INDEPENDEN
(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015-2017)**

SKRIPSI



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi**

**Oleh :
Skolastika Yayan Herawati
13150159M**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
YANG DIMODERASI KOMISARIS INDEPENDEN**
**(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015-2017)**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang ujian skripsi pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si.
NIS : 01200504012113

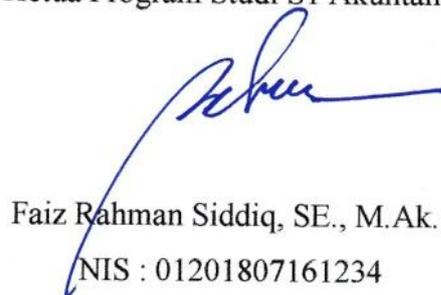
Pembimbing II



Titiek Puji Astuti, SE., M.Si., Akt., CA.
NIS : 01201112162152

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak.
NIS : 01201807161234

LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
YANG DIMODERASI KOMISARIS INDEPENDEN
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015-2017)**

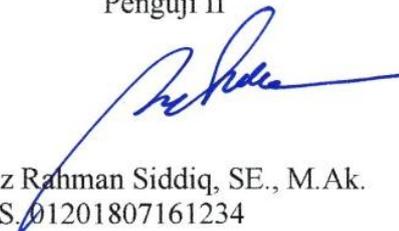
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Setia Budi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2019

Penguji I


Agus Endrianto Guseno, SE., MBA.
NIS. 01200401021090

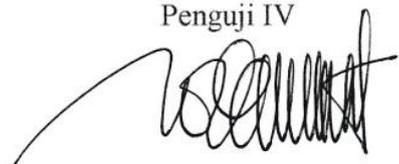
Penguji II


Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak.
NIS. 01201807161234

Penguji III


Titiek Puji Astuti, SE., M.Si., Akt.
NIS. 01201112162152

Penguji IV

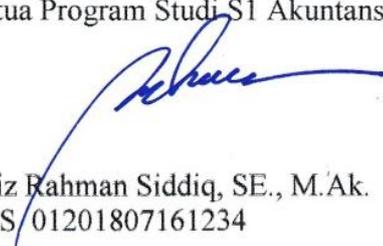

Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si.
NIS. 0120050412113



Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si.
NIS. 0120050412113

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak.
NIS. 01201807161234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik bagian atau seluruhnya. Pendapat atas temuan orang lain, yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surakarta, 21 Agustus 2019



Skolastika Yayan Herawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas semua karunia yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi Komisaris Independen (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)” dengan baik lancar dan tepat waktu. Tugas Akhir Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Setia budi Surakarta.

Peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dari berbagai pihak Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan berdoa semoga Tuhan Yesus menambah kebaikan atas mereka khususnya kepada:

1. Yang paling utama Tuhan Yang Maha Esa
2. Dr. Ir Djoni Taringan MBA., Rektor Universitas Setia Budi Surakarta
3. Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta
4. Faiz Rahman Siddiq, S.E., M.Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta
5. Dr. Widi Hariyanti, S.E., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan Tugas Akhir Skripsi

6. Titiek Puji Astuti, SE., M.Si., Akt., CA. Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan tugas akhir, meluangkan waktu dan memberikan waktu dan memberikan masukan pada Tugas Akhir Skripsi
7. Dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah memberikan saran dan pengetahuan bersifat membangun
8. Bapak Ibu Dosen dan Seluruh Staff Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi, yang telah memberi bekal ilmu yang tak ternilai harganya kepada penulis selama belajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta.
9. Bapak, ibu dan adik tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak dan ibu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yesus.
10. Untuk kerabat dan sahabatku favian, linda, putri, erika, dyna, wawan yang telah memberikan banyak bantuan dalam dukungan dan menyemangati dalam penulisan skripsi
11. Semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta.

Surakarta, 28 Juli 2019

Penulis

Skolastika Yayan

INTISARI

Herawati, Skolastika Yayan, 2019. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi Komisaris Independen (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi. Pembimbing I Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si. Pembimbing II Titiek Puji Astuti, SE., M.Si., Akt., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, serta menguji peran dewan komisaris independen dalam memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Dalam penelitian ini juga terdapat variabel moderasi yakni dewan komisaris independent.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis regresi linier berganda dan analisis residual. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, sedangkan analisis residual digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 perusahaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *E-Views* versi 9.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dewan komisaris independent juga ditemukan dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

Kata kunci: perencanaan pajak, dewan komisaris independen, manajemen laba.

ABSTRACT

Herawati, Skolastika Yayan, 2019. Effects of Tax Planning on Moderated Profit Management Independent Commissioners (Case Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange). Essay. SI Accounting Study Program. Faculty of Economics, Setia Budi University. Advisor I Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Sc. Advisor II Titiek Puji Astuti, SE., M.Sc., Akt., CA.

This study aims to examine the effect of tax planning on earnings management, and examine the role of independent commissioners in moderating the relationship between tax planning and earnings management. The independent variable in this study is tax planning, while the dependent variable in this study is earnings management. In this study there are also moderating variables namely the independent board of commissioners.

This research is a quantitative study with multiple linear regression analysis and residual analysis. Multiple linear regression is used to test the effect of tax planning on earnings management, while residual analysis is used to test the effect of moderating variables. The population in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange. By using the purposive sampling method, the companies that were sampled in this study were 56 companies. Data analysis in this study using the E-Views version 9 application

This research is a quantitative study with multiple linear regression analysis and residual analysis. Multiple linear regression is used to test the effect of tax planning on earnings management, while residual analysis is used to test the effect of moderating variables. The population in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange. By using the purposive sampling method, the companies that were sampled in this study were 56 companies. Data analysis in this study using the E-Views version 9 application.

The results of this study indicate that tax planning has a positive effect on earnings management. The independent board of commissioners was also found to moderate the effect of tax planning on earnings management.

Keywords: tax planning, independent board of commissioners, earnings management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	16
2.1.2. Manajemen Laba.....	17
2.1.3. Perencanaan Pajak	20

2.1.4. Komisaris Independen.....	22
2.2. Pengembangan Hipotesis	24
2.2.1. Hubungan Antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.....	24
2.2.2. Hubungan Komisaris Independen sebagai moderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.....	25
2.3 Model Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Desain dan Jenis Data	31
3.2 Populasi, sampel, dan teknik penyampelan.....	31
3.2.1 Populasi.....	31
3.2.2 Sampel.....	32
3.3 Definisi operasional variabel	33
3.3.1 Variabel dependen (Y) adalah Manajemen Laba	33
3.3.2 Variabel independen (X).....	36
3.3.3 Variabel Moderasi	36
3.4 Teknik Analisis Data.....	37
3.5 Uji Ketepatan Model.....	41
3.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	41
3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	41
3.6 Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.6.1 Persamaan Regresi Model 1	42
3.6.2 Persamaan Regresi Model 2	43

3.6.3	Persamaan Regresi Model 3	43
3.7	Klasifikasi Jenis-Jenis Variabel Moderasi	44
3.7.1	Uji Pengaruh Variabel Independen (Uji t).....	44
3.7.2	Uji Variabel Pemoderasi (Uji Residual).....	45
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1	Deskripsi Sampel	48
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	49
4.2.1	Analisis Statistika Deskriptif.....	49
4.3	Analisis Induktif.....	50
4.1.1	Uji <i>Chow</i>	50
4.4	Uji Ketepatan Model	53
4.4.1	Uji Signifikansi F.....	53
4.4.2	Uji Koefisien Determinasi	55
4.5	Uji Regresi Linier Berganda	56
4.6	Uji Hipotesis	59
4.6.1	Uji Pengaruh Variabel Bebas	59
4.6.2	Uji Pengaruh Variabel Moderasi	60
4.7	Pembahasan.....	61
4.7.1	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	61
4.7.2	Dewan Komisaris Independen Memoderasi Hubungan Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba	62

BAB V	PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Keterbatasan	61
5.3	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Penelitian	30
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel	48
Tabel 4.2 Statistika Deskriptif.....	49
Tabel 4.3 <i>Common Effect Model</i>	51
Tabel 4.4 <i>Fixed Effect Model</i>	51
Tabel 4.5 Hasil Estimasi <i>Uji Chow</i>	52
Tabel 4.6 Hasil Signifikansi F model 1	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi F model 2	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi F model 3	55
Tabel 4.9 Hasil Uji koefisien determinasi model 1	56
Tabel 4.10 Hasil Uji koefisien determinasi model 2.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji koefisien determinasi model 3.....	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi linier berganda model 1	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier berganda model 2	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier berganda model 3	60
Tabel 4.15 Hasil Uji hipotesis variabel perencanaan pajak	61
Tabel 4.16 Hasil Uji hipotesis variabel komisaris independen	62
Tabel 4.17 Hasil Uji pengaruh variabel moderasi.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Statistik Deskriptif	67
Lampiran 2. Common Effect Model (Model 1)	68
Lampiran 3. Fixed Effect Model (Model 1)	69
Lampiran 4. Uji Chow Model 1	70
Lampiran 5. Common Effect Model (Model 2)	71
Lampiran 6. Fixed Effect Model (Model 2)	72
Lampiran 7. Uji Chow Model 2	73
Lampiran 8. Common Effect Model (Model 3)	74
Lampiran 9. Fixed Effect Model (Model 3)	75
Lampiran 10. Uji Chow Model 3	76
Lampiran 11. Analisis Regresi Berganda Model 1	77
Lampiran 12. Analisis Regresi Berganda Model II	78
Lampiran 13. Analisis Regresi Berganda Model 3	79
Lampiran 14. Klasifikasi Manajemen Laba	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak luar diluar korporasi organisasi. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk dilaporkan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan dengan parameter berupa laba (Nayiroh, 2013). Laba merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Informasi tentang laba mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (Endriati, Hidayati, dan Junaidi, 2017).

Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba di masa depan dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Melihat betapa penting peran laba bagi investor maupun pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan, tidak mengherankan pihak manajemen perusahaan melakukan suatu kegiatan yang digunakan dalam rangka peningkatan laba perusahaan demi menarik investor (Wiryandari dan Yulianti, 2009). Manajemen adalah pengelola perusahaan secara langsung, salah satu tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan laba yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen, karena semakin tinggi laba

yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen. Selain besarnya bonus yang akan diberikan kepada pihak manajemen, di era seperti sekarang ini perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat eksis dalam pasar global. Dalam rangka untuk kuat bersaing, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan (Endriati dkk, 2015). Situasi inilah yang biasanya mendorong manajer untuk melakukan suatu kegiatan yang digunakan dalam rangka peningkatan laba yang diharapkan oleh suatu perusahaan dengan cara manajemen laba.

Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan *accrual* dalam menyusun laporan keuangan (Scott, 2006). Sedangkan (Healy dan Wahlen, 1999) dalam Beneish (2001) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para stakeholders tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Menurut Philips, *et al* (2003) terdapat dua faktor yang

mendorong perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Faktor yang pertama yaitu untuk menghindari penurunan laba, manajer melakukan manajemen laba agar laba yang tersaji dalam laporan keuangan tidak berfluktuasi karena akan memberikan dampak yang kurang baik terutama bagi pihak investor. Faktor yang kedua yaitu untuk menghindari kerugian. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang mengalami kerugian, akan kehilangan kepercayaan pada pihak penanam modal, serta mendorong pemerintah untuk dilakukannya pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas praktik manajemen laba dapat dipandang dari dua perspektif yang berbeda, yaitu sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen dengan benar (*efficient contracting*) dan tindakan yang salah (*opportunistic*). Manajemen laba dikatakan positif ataupun memberikan keuntungan bagi pemegang saham jika manajemen laba digunakan untuk memberikan sinyal tentang informasi privat yang dimiliki oleh manajer atau untuk mengurangi biaya politik Watts dan Zimmerman (1986). Manajemen laba dikatakan negatif apabila digunakan untuk menghasilkan keuntungan abnormal pribadi bagi manajer seperti menaikkan kompensasi atau mengurangi kemungkinan pencatatan apabila kinerja manajer yang bersangkutan rendah (Healy dan Weisbach 2009).

Menurut Endriati, Hidayati dan Junaidi (2017) salah satu upaya perusahaan dalam merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karenanya, perekayasaan

laporan keuangan menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut kemudian mendasari sebab terjadinya ketidaksinambungan perolehan informasi antara pihak manajemen perusahaan sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan *stakeholder* atau hal ini dikenal dengan sebutan asimetri informasi.

Kusumawati dan Sasongko (2005) dalam tulisannya mengatakan bahwa diantara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Namun hal tersebut berbanding terbalik jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan merugikan laba bersih yang akan diperoleh. Jika laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut besar, maka secara otomatis pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar.

Berdasarkan hal tersebut kemudian menimbulkan keinginan pihak manajemen untuk menekan biaya-biaya dengan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen perusahaan cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hal tersebut kemudian yang mendasari terjadinya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal tersebut masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Aditama dan Purwaningsih, 2014). Dian, Saifi, dan Dwiatmono (2010) dalam tulisannya menyebutkan bahwa perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melaksanakan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Dengan demikian, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu tindakan perlakuan pajak minimum yang legal dan diperbolehkan secara hukum selama masih dalam pengawasan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak, selain itu aktifitas perencanaan pajak juga diperbolehkan dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Winanto

dan Widayat (2013) perencanaan pajak adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan material *non tax factor* untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha maupun lainnya.

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Menurut Desai dan Darmapala (2006) perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham dan kedua, dari perspektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunisme* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan.

Sebagai contoh kasus yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal. PT Kaltim Coal merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki Aburizal Bakrie (Ical)/ Grup Bakrie. Menurut seorang penyidik pajak kasus tersebut bermula dari Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) KPC pada tahun pajak 2007 yang disetor ke Kantor Pajak Wajib Pajak Besar, Gambir, pada Maret 2008. Pada SPT itu, KPC mengklaim telah lebih bayar pajak sebesar Rp 30 miliar. Artinya, KPC meminta

negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut. Namun karena ada klaim lebih bayar, dan jumlahnya besar, maka pihak penyidik melakukan pemeriksaan dan pihak penyidik menyatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dan rutin dilakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Hasil pemeriksaan awal pun keluar, status SPT 2007 dari KPC seharusnya tidak lebih bayar, justru kurang bayar. Atas hal itu KPC diminta untuk memperbaiki SPT perusahaan tersebut, bahkan kantor pajak mengatakan Direktur Jenderal Pajak saat itu, yakni Darmin Nasution, turun tangan dengan berbicara kepada petinggi Grup Bakrie. Jika PT Kaltim Prima Coal tidak segera memperbaiki SPT maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Tempo,2010).

Walaupun telah diberikan himbauan, namun himbauan dari kantor pusat tersebut tidak digubris oleh PT Kaltim Prima Coal. Pemeriksaan pun dilanjutkan dan menemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada 2007. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resources Tbk, di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan mamakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung. Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar.

Penyidik menyatakan bahwa seluruh transaksi penjualan yang dilakukan oleh KPC maupun Indocoal masuk ke satu rekening. Bahkan, invoice atau tanda terima transaksi Indocoal dengan pembeli di luar negeri pun dibuat oleh pihak KPC di Kalimantan. Maka terbitlah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atas kasus tersebut pada 4 Maret 2009. Sebelum penerbitan surat perintah itu, kantor pajak mengaku belum menerima revisi SPT dari KPC yang sebelumnya telah dianjurkan kantor pusat (Tempo,2010).

Selang 16 hari kemudian atau pada 20 Maret 2009, KPC melayangkan gugatan ke Pengadilan Pajak atas terbitnya surat perintah tersebut. Intinya, KPC menilai penyidik pajak tak menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan. Dipermasalahkannya proses pemeriksaan ternyata tak membuat Direktorat Jenderal Pajak menghentikan pemeriksaan. Sepuluh hari setelah gugatan KPC masuk ke Pengadilan Pajak, atau 30 Maret 2009, pemeriksaan pun ditingkatkan ke penyidikan. Dan itulah yang terjadi, penyidikan kasus dugaan pidana pajak KPC digelar. Penyidikan itu pula yang kemudian dipersoalkan KPC lewat permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah menerima putusan Pengadilan Pajak tertanggal 8 Desember 2009 yang membatalkan Surat Perintah Pemeriksaan Buper kasus KPC. Pada permohonan praperadilan tersebut, KPC dengan tegas meminta majelis hakim praperadilan membatalkan penyidikan yang dilakukan oleh aparat pajak. Namun, Kantor Pusat Pajak menolak pendapat itu. Selain menganggap permohonan praperadilan yang diajukan KPC salah alamat, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Fendy Dharma Saputra, menegaskan bahwa penyidikan dilakukan bukan berdasarkan pada surat perintah Buper (Tempo,2010).

Penyidik pajak rupanya sangat yakin dengan indikasi pidana pada kasus KPC. Terlebih setelah adanya cicilan pembayaran pajak 2007 yang disetor KPC pada periode April hingga Oktober 2009 yang totalnya mencapai Rp 800 miliar. Dikonfirmasi soal hal ini, Pontas dari Kantor Pusat Pajak dan Aji dari KPC sama-sama mengakui adanya setoran pembayaran pajak 2007 yang dilakukan KPC pada 2009 tersebut. Pontas enggan berkomentar soal SPT Pembetulan tersebut. Namun menurut pengacara KPC, Aji SPT Pembetulan itu dilakukan bukan untuk mengakui atau membayar kurang bayar pajak yang kini sedang disidik Direktorat Jenderal Pajak. Duit Rp 800 miliar adalah pembayaran kurang bayar pajak yang dihitung sendiri oleh KPC setelah tak pernah mendapat respon dari kantor pajak atas SPT 2007 yang diajukan awal 2008 (Tempo,2010).

Saat itu, Aji menceritakan, selain menyusun SPT 2007, KPC juga sedang memperbaiki SPT 2005 dan 2006 dalam rangka *sunset policy*. Kedua SPT untuk *sunset policy* disusun bersama dengan panduan pemeriksa pajak dan segera disetor ke kantor pajak. Namun kedua SPT tersebut tidak pernah ditanggapi oleh aparat pajak. Karena beberapa kali surat yang dilayangkan kepada kantor pajak untuk memperjelas nasib ketiga SPT tadi tak ditanggapi, KPC pun berinisiatif menyusun SPT Pembetulan. Menurut Pontas, cicilan tersebut sudah diterima kantor pajak dan disetor ke kas negara. Tapi, kata dia, statusnya bukan lagi sebagai pembayaran pajak. Begitu pula atas SPT Pembetulan dari KPC, Direktorat Jenderal Pajak tak mengakuinya karena kasusnya telah dalam penyidikan pidana. Undang-Undang KUP menyatakan penghentian penyidikan kasus pidana pajak bisa dilakukan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan setelah wajib

pajak mengakui kesalahannya dan membayar tunggakan pajak ditambah denda sebesar empat kali pajak terutang. Artinya, jika kurang bayar pajak KPC dalam kasus ini Rp 1,5 triliun, maka setoran KPC yang bisa menghentikan penyidikan mencapai Rp 7,5 triliun (Tempo,2010).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Kaltim Prima Coal (KPC), faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Aditama dan Purwaningsih, 2014). Penelitian Santana dan Wirakusuma (2016) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Aditama dan Purwaningsih (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Menurut teori keagenan, untuk menangani masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (Midiastuty & Machfoedz, 2003). Sebagaimana diungkapkan oleh Veronica dan Bachtiar (2004) *Good corporate governance* adalah salah satu cara untuk mengendalikan tindakan *oportunistik* yang dilakukan manajemen. Salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat

digunakan untuk mengatasi konflik keagenan yaitu komisaris independen. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Terkait dengan manajemen laba, komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun (Dananjaya dan Ardiana, 2016).

Dewan komisaris bertugas serta bertanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Hal ini penting karena terdapat kepentingan dari manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba yang akan memiliki dampak pada menurunnya kepercayaan para investor. Untuk mengatasi hal itu dewan komisaris diizinkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mengawasi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No.

1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* (2001) adalah menegaskan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan memikirkan kepentingan seluruh stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (Mayangsari 2003. Guna dan Herawaty (2010) menguji hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang dimoderasi oleh komisaris independen, hasilnya menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan beberapa indikator yang mempengaruhi praktik manajemen laba maka disusunlah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba yang dimoderasi komisaris independen pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”**

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi Komisaris Independen Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”** selanjutnya pertanyaan penelitian ini diajukan untuk menjawab rumusan masalah :

1. Apakah Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 ?
2. Apakah Komisaris Independen Dapat Memoderasi Pengaruh Antara Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris :

1. Untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
2. Untuk menganalisis Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang akuntansi

keuangan dan akuntansi perpajakan khususnya pengembangan studi kasus terkait manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengambil kebijakan akuntansi yang lebih tepat terkait manajemen laba agar tidak merugikan pemakai laporan keuangan.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan berguna untuk membantu dalam memahami praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang lebih baik.

c. Bagi kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis kemampuan kredit dan praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan sehingga kreditor dapat mengambil keputusan mengenai kelayakan kredit yang lebih baik.